

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inggris Raya atau Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur di bawah monarki konstitusional dan sistem parlementer dengan ibu kota pemerintahannya berada di London. Terdapat empat negara dalam kedaulatan Britania Raya yang masing-masingnya berdiri sendiri: Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Inggris Raya adalah salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar keenam di dunia menurut pendapatan domestik bruto (PDB) nominal dan terbesar kedelapan di dunia menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Inggris Raya juga merupakan negara industri pertama di dunia dan menjadi penguasa dunia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berbicara tentang negara berdaulat ini, sangat erat kaitanya dengan organisasi kawasan Uni Eropa mengingat Inggris memiliki peran dan andil besar terhadap kemajuan integritas kawasan Uni Eropa.

Inggris merupakan negara industrialisme terbesar dan kuat terbukti dengan PDB yang tinggi Inggris mampu menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang kuat, Inggris mampu mempengaruhi negara-negara satu kawasannya melalui setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah federasi Inggris termasuk Uni Eropa. Inggris juga merupakan dengan sistem demokrasi. Sebagai salah satu negara demokrasi, Inggris tentu memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara Eropa lainnya mengingat Inggris sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai demokratis bagi rakyatnya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menjadikan negara Inggris sebagai subjek dalam karya tulis ini.

Keputusan Nasional Inggris untuk tidak menandatangani perjanjian “*The Maastricht*” yang mengharuskan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk menggunakan mata uang Euro. Pada tahun 1991 Inggris mengajukan klausul-klausul yang mengemukakan bahwa Inggris akan terus menggunakan mata uangnya sendiri yakni Poundsterling, hal ini dilakukan Inggris karena Inggris memiliki motif politik lain yakni, Inggris menginginkan dirinya sebagai penyeimbang negara-negara di Eropa, hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa mata uang Inggris pada dasarnya telah stabil di dunia internasional. Selain itu, Inggris juga tidak mau menandatangani perjanjian Schengen. Perjanjian Schengen merupakan perjanjian yang dibuat oleh sejumlah negara Eropa untuk menghapuskan pengawasan perbatasan di antara mereka. Di dalam perjanjian ini tercakup berbagai aturan kebijakan bersama untuk izin masuk jangka pendek (termasuk di dalamnya Visa Schengen) atau zona bebas perbatasan. Inggris juga tidak termasuk dalam anggota EFTA, perjanjian perdagangan bebas Eropa. Inggris hanya terikat dalam EEA (*European Economic Area*) atau kerja sama pertukaran orang, pelayanan, barang, dan modal dalam pasar internal Uni Eropa.

. Bermula setelah perang dunia kedua, muncul keinginan masyarakat Eropa untuk mengembalikan perekonomian dan menyatukan negara-negara di Eropa pasca perang di kawasan tersebut, sehingga pada tahun 18 April 1951 terbentuklah “*European Coal and Steel Community* (ECSC) yang diinisiasi oleh negara Prancis dan lima negara lainnya. Lima negara tersebut antara lain Luxemburg, Jerman,

Belanda, Italia dan Belgia. Hingga kemudian pada tanggal 25 Maret 1957 nama tersebut diubah dengan *European Economic Community* (EEC) dengan harapan terciptanya pasar bersama *Common Market*. *Common market* adalah tahap integrasi suatu wilayah atau negara-negara dimana pergerakan barang dagang, jasa, modal dan penduduk dibebaskan secara bertahap sampai tidak ada lagi hambatan dan sekarang ini dikenal dengan nama Uni Eropa.

Krisis minyak yang terjadi di tahun 1973 mengakibatkan perlambatan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara Inggris. Seiring dengan hal tersebut, Inggris kemudian mulai melirik peluang keanggotaan di Uni Eropa. Di awal pembentukan Uni Eropa, Inggris melihat adanya perbedaan cukup jauh antara PNB (Produk Nasional Bruto) perkapita negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dengan pertumbuhan PNB Inggris yang kemudian melatarbelakangi Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Diharapkan dengan bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa dapat memperbaiki atau meningkatkan keadaan perekonomian Inggris pada saat itu. Inggris kemudian resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1973. Dalam proses aksesi Inggris ke Uni Eropa, Inggris mengalami beberapa kendala dalam proses keanggotaannya di Uni Eropa.

Selama keanggotaannya dengan Organisasi ini, Inggris adalah salah satu kontribusi besar terhadap perkembangan Uni Eropa terutama dalam pendanaan di Uni Eropa. Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa bukan tanpa alasan, Inggris tentu ingin mendapatkan keuntungan yang besar terkait dengan keanggotaannya di Uni Eropa. Contoh keuntungan yang didapatkan Inggris antara lain mendapatkan

perlindungan dari Uni Eropa terkait segala sektor, menghilangkan hambatan perdagangan seperti kemudahan ekspor dan bea cukai ke Uni Eropa. Seiring dengan keuntungan yang didapatkan Inggris sejak menjadi anggota dalam Uni Eropa menciptakan adanya evaluasi keanggotaan Inggris oleh semua elemen masyarakat Eropa, sejak keanggotaannya pada Uni Eropa di tahun 1973, beberapa pihak kurang setuju terkait dengan hal tersebut, sehingga munculah kelompok-kelompok *pro-brexit* yang menginginkan Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Seiring munculnya kelompok tersebut kemudian muncul sebuah gagasan atau opini dari rakyat untuk menggelar sebuah referendum keanggotaan Inggris terhadap Uni Eropa. Referendum merupakan suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Opini yang dibentuk oleh masyarakat kemudian mendorong parlemen dan pemerintahan turut memberikan kontribusi dan suaranya dalam referendum yang digelar. Meskipun opini yang terbentuk antara pemerintah dan rakyat Inggris memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi keanggotaan Inggris pada Uni Eropa.

Inggris mengadakan referendum terakhir terkait keanggotaannya dengan Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016. Referendum ini adalah referendum kedua, setelah referendum pertama yang digelar di tahun 1975. Sejak diputuskannya bergabungnya Inggris ke Uni Eropa yang pada saat itu bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Untuk pertama kalinya, Keputusan Inggris untuk

meninggalkan keanggotaan Uni Eropa dinilai sangat serius dan riskan. Mengingat Inggris adalah aset kuat dan sangat substansial bagi Uni Eropa. Tanpa adanya Inggris, Uni Eropa dimata mitra kerja negara-negara superpower akan melemah begitupun dengan negara-negara berkembang. (Counsel, The Impact On the UK and the EU, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pemaparan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah proses pemecahan masalah dan sebagai panduan dalam pembahasan selanjutnya, dapatlah ditarik pokok permasalahan seperti berikut ini:

“Mengapa Inggris keluar dari Uni Eropa pada Referendum 2016?”

C. Kerangka Teori

Teori digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa dan meramalkan suatu kejadian ataupun fenomena, sebuah teori didukung melalui sekumpulan data yang terbentuk kemudian menjadi sebuah fakta. Dalam menjawab rumusan masalah dengan kalimat tanya “Mengapa” maka dapat diritikan harus berteori secara ontologis. Berteori adalah upaya untuk memberikan makna pada suatu fenomena yang terjadi. Atau juga bisa dikatakan teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. (Mas'ood M. , 1990, hal. 30). Untuk menjawab rumusan masalah *“Mengapa Inggris Keluar dari Uni Eropa pada Referendum 2016?”* maka penulis menguraikan fenomena tersebut melalui paradigma idealisme pada Teori Kebijakan Luar Negeri oleh James T. Shotwell.

Teori Kebijakan Luar Negeri (James T. Shotwell)

Negara merupakan sebuah wilayah institusi yang terbentuk atas representasi atau koalisi kepentingan individual maupun grup. Negara demokrasi maupun otoriter memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara lainnya. Nilai-nilai domestik dan institusi mampu membentuk sebuah kebijakan Luar Negeri suatu negara. Misalnya, pada negara Otoriter maka negara tersebut lebih memilih bertindak secara agresif bukan kooperatif, berbanding tebalik dengan negara demokratis yang justru akan bertindak secara kooperatif. Sebuah Negara demokrasi adalah negara dengan sistem politiknya meletakkan kehendak rakyat sebagai prioritas utama dalam membuat kebijaksanaan. Inggris sendiri sebagai sebuah negara yang demokratis, memiliki karakteristik kebijakan luar negeri yang berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lain meski masih dalam satu kawasan. Sehingga, dibutuhkan kerangka pemikiran yang berbeda dalam menganalisis proses kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh sebuah parlemen di Inggris. Dalam sebuah negara demokratis, rakyat dapat mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan luar negeri sebuah negara.

Dalam Hubungan Internasional ada bermacam-macam aliran pemikiran yang melandasi cara berfikir dalam mengamati atau menganalisa sebuah fenomena maupun keilmuan dari Hubungan Internasional. Ada berbagai macam aliran pemikiran dalam ilmu Hubungan Internasional, salah satu pemikiran tersebut adalah pemikiran idealis. Pemikiran Idealis sangat percaya pada kekuatan afektif sebuah ide, yang mungkin menjadi dasar sistem politik terutama pada

moralitas. Prinsip-prinsip pemikiran idealis mampu mengevolusi karakter manusia. Salah satu cabang teori dari pemikiran Idealis adalah teori yang diungkap oleh Sothwell terkait dengan Kebijakan Luar Negeri.

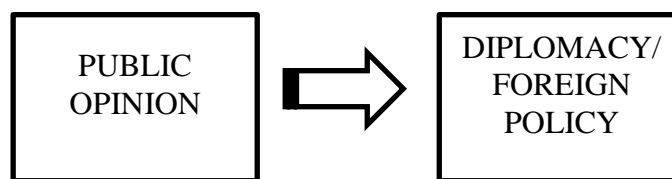
James T. Shotwell berasumsi bahwa:

“Although public opinion is often portrayed as naive , but public opinion and its influence of diplomacy was one of the striking aspects of peace making process after World War I.” (Shotwell, 1973)

Dari asumsi Shotwell tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kaum idealis meyakini bahwa sebuah opini publik merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi diplomasi. Pemikiran kunci dari suatu kenyataan tersebut adalah bahwa sebuah Kebijakan Luar Negeri juga mampu dipengaruhi oleh publik opini. Dalam hal ini publik opini diciptakan oleh rakyat.

Bagan 1. 1 Theory James T. Shotwell

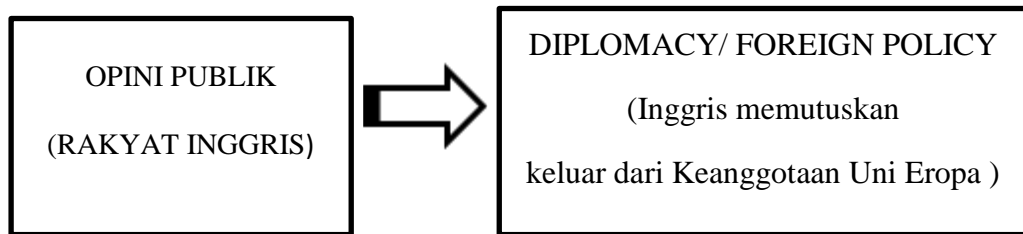
Democratic activism change international relations



Sumber: Diktat Perkuliahan Teori Hubungan Internasional 1 oleh Dr. Nur

Azizah, M.Si.

Bagan 1.2 Impikasi Teori James T. Shotwell



Secara etimologi, kata "Opini" berasal dari bahasa latin "opinary" yang berarti berpikir atau menduga sedangkan "publik" yang juga merujuk pada bahasa latin "publicus" yang mengandung arti "masyarakat luas". Secara konseptual, opini merupakan buah pikiran manusia yang sifatnya lebih mendalam daripada sebuah kesan namun kedudukannya lemah daripada pengetahuan yang positif. Sedangkan, publik dapat dijelaskan sebagai sekelompok orang yang membentuk kelompok besar maupun kecil yang menaruh perhatian pada suatu hal yang sama dan memiliki solidaritas terhadap kelompoknya. Opini publik dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang merupakan aktualisasi peran politik masyarakat. Dalam hal ini opini publik tidak selalu rasionalitas, bahkan opini publik mampu mematahkan nilai-nilai rasionalitas dalam suatu negara. Terlebih lagi negara tersebut menerapkan sebuah sistem demokrasi.

Terkait dengan opini publik yang terbentuk oleh rakyat, maka erat kaitannya pula pada sebuah Persepsi. Persepsi merupakan salah satu konsep yang memainkan peranan penting dalam menentukan perilaku sebuah negara. Dalam

mengorganisasikan sebuah persepsi maka ada beberapa unsur-unsur pembentuk persepsi seseorang, unsur-unsur tersebut antara lain *values*, *ideologies* dan *attitude* (Tingley, 2013). Ketiga unsur tersebut turut mendominasi evaluasi keanggotan Inggris terhadap Uni Eropa. Nilai adalah preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lainnya. Nilai-nilai berbicara mengenai Inggris yang merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, bagaimana rakyat Inggris memaknai sebuah *Nation* atau bangsanya. Ideologi atau keyakinan merupakan sikap bahwa suatu deskripsi realitas adalah benar, terbukti, atau telah diketahui. Keyakinan sering didasarkan pada penerimaan. Ideologi atau keyakinan berbicara terkait dengan Inggris yang memiliki peradaban yang tinggi, sehingga rakyat Inggris percaya bahwa negaranya berbeda dengan negara lainnya di kawasan Uni Eropa. Sementara itu, persepsi memainkan peran dalam menentukan sebuah perilaku atau sikap. Sehingga, rakyat melakukan tindakan atas dasar apa yang telah mereka ketahui. Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang “kenyataan”. (Mas'od M. , 1989, hal. 19). Kenyataan tersebut bahwa sikap rakyat Inggris yang cenderung skeptis pada integrasi Uni Eropa.

Berikut penjelasan terkait dengan unsur-unsur pembentuk sebuah persepsi:

1. Nilai-nilai (*Domestic Values*)

Negara Inggris merupakan sebuah negara monarkhi berbentuk kerajaan, pemerintah dibawah kekuasaan seorang raja. Rakyat Inggris

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai primodialisme bangsanya. Primodialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya (Wikipedia, 2016). Keinginan masyarakat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa muncul akibat sentimen primodial dan keresahan orang-orang telah lama tinggal di Inggris melihat Inggris yang semakin plural. Inggris merupakan sebuah negara kesatuan, Inggris sangat berbeda dengan negara-negara Eropa lain. Bangsa Inggris bukanlah bangsa Eropa. Dan hal ini terkait dengan rakyat Inggris memaknai sebuah *Nation* atau Bangsa. Inggris tidak menyatu secara politis di dalam Uni Eropa sehingga entitas Inggris tetap independen dari Uni Eropa, dan terhadap Inggris tidak diberlakukan perjanjian Schengen. Perbatasan Inggris tetap tanpa pembatas yang tidak diinginkan oleh Inggris.

Inggris merupakan sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam negaranya. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pola politik luar negeri tentunya berbeda dengan negara-negara lain dalam satu kawasan Uni Eropa. Meskipun pemerintahan baik tokoh-tokoh politik maupun parlemen benar-benar menyatakan 60% suara memihak kepada Uni Eropa, akan tetapi dengan adanya sistem demokrasi tersebut suara pemerintah dapat diabaikan begitu saja, karena pada sistem demokrasi suara rakyat lah yang berpengaruh dalam sebuah proses kebijakan domestik maupun luar negeri suatu negara. Yang dalam hal ini, rakyat

lebih memilih untuk tetap pada keputusan keluarnya Inggris pada Uni Eropa.

Selain itu pula *National pride* terhadap Inggris oleh rakyatnya semakin melatarbelakangi rakyat Inggris keluar dari Uni Eropa. Terlebih lagi Inggris merupakan negara pemrakarsa berdirinya organisasi persemakmuran *The Commonwealth of Nation* yang merupakan aset atau investasi terbesar Inggris, organisasi Persemakmuran Inggris sekarang ini memiliki 53 negara termasuk Inggris sebagai pendiri organisasi tersebut. Persemakmuran merupakan lanjutan dari Kerajaan Britania Raya (dikenal dengan Kerajaan Inggris) dan lahir dari hasil Konferensi Kerajaan pada akhir tahun 1920-an. Setelah negara-negara yang dijajah oleh Kerajaan Inggris mencapai kemerdekaan, kemudian didirikanlah Persemakmuran ini. Negara anggota persemakmuran kemudian sangat bergantung kepada Negara inti (Inggris) dalam bidang ekonomi, politik, militer. Kelemahan inilah yang kemudian menjadikan keuntungan Inggris sebagai negara pemrakarsa terbentuknya organisasi ini.

2. Ideologi atau Identitas

Ideologi merupakan pedoman hidup dalam berfikir atau bertindak, Ideologi negara merupakan mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dapat melalui Identitas nasional yang merupakan sebuah identitas suatu kelompok yang melahirkan ciri atau

sifat suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Inggris merupakan sebuah negara yang spesial dibandingkan dengan negara lain. Rakyat Inggris memiliki peradaban yang tinggi, sehingga Inggris menginginkan menjadi salah satu negara superpower kembali seperti pada masa kejayaannya dalam perang dunia dan menjadi negara yang terdepan dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Peradaban yang tinggi tersebut terlihat dari pemakaian bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Hal tersebut kemudian membentuk suatu rasa kebanggaan tersendiri bagi rakyat Inggris.

3. *Attitude* atau Sikap

Sejak keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa, sebagian masyarakat Inggris menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kegagalan suara yang terjadi pada referendum pertama di tahun 1975, kemudian mendorong evaluasi bersama kembali semua elemen rakyat Inggris dalam merespon keanggotaan Uni Eropa. Hingga pada akhirnya referendum berhasil digelar kembali pada tahun 2016, agenda referendum tersebut mengevaluasi terkait berbagai sektor yang menjadikan rakyat Inggris merasa dirugikan atas keanggotaan Uni Eropa. Sebuah Referendum harus diselenggarakan demi kelangsungan kehidupan masyarakat Inggris. Sikap sentimen yang tinggi rakyat Inggris terhadap Uni Eropa, lahir dari beberapa evaluasi

terkait masalah kedaulatan, ekonomi, identitas, imigran dan masalah lainnya.

Inggris merupakan salah satu kekuatan utama di Uni Eropa bersamaan dengan Jerman, Prancis, dan Italia dalam hal kontribusi pendanaan dalam Uni Eropa. Akan tetapi, Inggris bukanlah salah satu negara penggerak utama Uni Eropa. Inggris lebih bersikap skeptis pada Uni Eropa, buktinya dengan Inggris baru bergabung dengan Uni Eropa tahun 1973 dan hal itu merupakan waktu yang terlambat bagi Inggris untuk bergabung pada Uni Eropa. Sikap Skeptis Inggris jadi penyebab ingin keluar dari Uni Eropa. Inggris menilai Uni Eropa mengekanginya dengan berbagai aturan yang tidak menguntungkan Inggris sendiri. Selain itu, Inggris ingin mengontrol penuh perbatasan dan mengatur orang yang masuk dan tinggal atau bekerja di Inggris. Hal itu menjadi kontradiksi sendiri bagi konsep Uni Eropa. (bagas, 2016)

Selain hal tersebut diatas, opini juga datang dari masyarakat Inggris yang berasal dari kota-kota besar seperti London dan juga kota-kota kecil di Inggris Raya terkait sikap rakyat dalam menanggapi kehadiran *Foreign Direct Investment* (FDI). Dari hampir semua aspek, London menandingi New York sebagai satu-satunya kota global sejati. Tetapi keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa pada referendum 2016 lalu mengartikan bahwa kota itu dapat kehilangan haknya menjual jasa bebas bea di seluruh blok itu, mempertaruhkan posisinya sebagai markas keuangan Eropa. Kekhawatiran akan dampak keluar dari Uni Eropa, dan

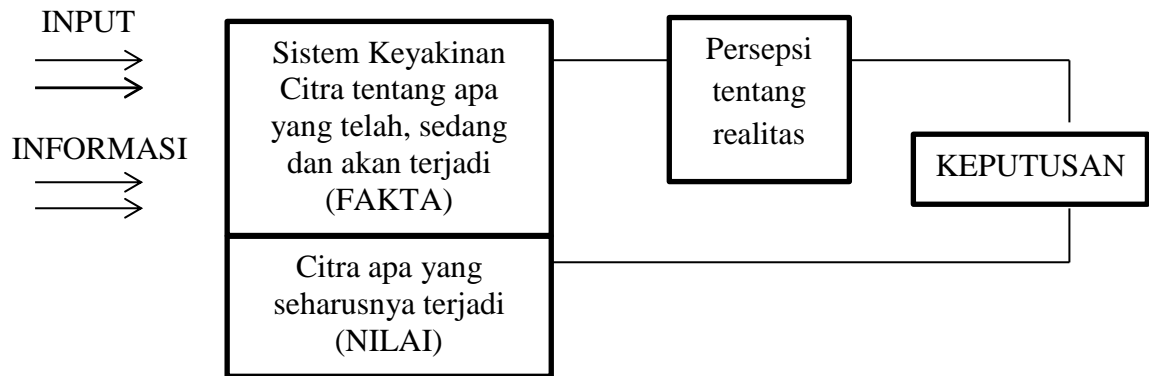
aksesnya ke pasar tunggal dengan 500 juta penduduk, tampak di seluruh kota London. Beberapa bank, termasuk bank besar global HSBC, mengatakan mungkin mengalihkan operasinya ke daratan Eropa seperti kota-kota kecil di negara-negara Uni Eropa. (Ridgwel, 2016)

Sementara itu, kota-kota kecil baik di Inggris Raya maupun di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya menyuarakan untuk Inggris tetap keluar dari Uni Eropa, alasannya adalah karena investasi dapat beralih secara langsung dari kota besar ke kota kecil, hal tersebut dapat meningkatkan PDB kota-kota kecil yang semula tidak ada perubahan signifikan dan statis.

Para pembuat keputusan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologi yang mempengaruhi persepsi itu, misalnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya. Ole R. Holsti membuat diagram yang menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan seperti berikut:

Bagan 1.3 Hubungan antara sistem keyakinan dengan

pembuatan keputusan kebijakan luar negeri



Sumber: The Belief System and National Images-Oleh: Ole R. Holsti

Secara operasional, dalam mengukur suatu variabel dalam hal ini opini publik rakyat Inggris maka opini publik tersebut dapat diukur melalui indikator:

- a. Politik domestik Inggris yakni dukungan dari parlemen melalui *House of Commons*
- b. Analisa wacana dari berbagai sumber, seperti tokoh politik, majelis rendah (*House of commons*), anggota-anggota parlemen dan lain sebagainya.

Implikasi terhadap studi kasus ini adalah opini rakyat mampu mempegaruhi politik luar negeri di Inggris. Opini rakyat ditunjukkan melalui jejak pendapat dengan dibuktikan dengan adanya Referendum Pemerintah Inggris. Dalam menghadapi masalah terkait dengan keberlangsungan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Sehingga, rakyat Inggris merasa perlu mengadakan referendum

tersebut. Meskipun, rakyat dan pemerintah memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda menanggapi referendum tersebut.

James Wilson negarawan Pennsylvania berasumsi:

“In our governments, the supreme absolute, and uncontrollable power remains in the people. As our constitutions are superior to our legislatures, so the people are superior to our constitution. In giving a definition of what I meant by a democracy. I termed it, that government in which the people retain the supreme power.”

Maksud dari asumsi James Wilson adalah kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat, meskipun pemerintahan legislatif lebih unggul didalam sebuah konstitusi. Konstitusi akan memberikan definisi terkait dengan demokrasi tersebut. Sementara pendapat lain datang dari Presiden keenam Amerika Serikat masih terkait dengan demokrasi. Bahwasannya demokrasi adalah *“government ‘of the people, by the people, and for the people”* (Lincoln). Demokrasi liberal merupakan istilah dalam menjelaskan sistem politik Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya termasuk Inggris. Merupakan sebuah bentuk demokrasi modern, yang cenderung untuk menekankan perlindungan hak-hak individu daripada hak-hak kolektif (Democracy Glosary). Sebagai salah satu negara demokrasi, Inggris menempatkan rakyat sebagai salah satu representasi negara, rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam setiap proses pembuatan kebijakan.

Masalah opini publik dan pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan luar negeri telah menjadi masalah sengketa sejak perang dingin antara realis dan liberal. Idealisme ditandai dengan peran penting yang dimainkan oleh hukum internasional dan organisasi internasional dalam sebuah konsepsi pembentukan kebijakan. Akar dari sebuah pemikiran idealisme adalah Liberal institusionalist, dalam studi kasus ini aspek Liberal Institusionalis bukan mengenai permasalahan ekonomi akan tetapi Liberal politik dan sosial, dimana sebuah konsep liberalisasi adalah Rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan termasuk dalam menentukan keberlangsungan kehidupan keanggotaan negaranya dengan Organisasi Uni Eropa. Pemikiran Idealis tentu berbeda dengan pemikiran realis pada umumnya. Pemikiran realis dalam menjawab rumusan masalah cenderung akan menjawab dari sebuah kepentingan nasional negara, berbeda dengan hal itu dalam menjawab rumusan masalah dalam studi kasus ini melalui pemikiran idealis teori Kebijakan Luar Negeri James T. Shottwell maka jawaban atas rumusan masalah tersebut adalah merujuk terhadap unsur-unsur pembentuk sebuah publik opini. Unsur-unsur tersebut antara lain *values*, *ideologies* dan *attitude* (Tingley, 2013).

Konsep publik opini merupakan salah satu konsep yang sangat kontroversi terutama dalam ilmu Hubungan Internasional. Merupakan sebuah konsep yang lahir dari tatanan masyarakat yang modern seperti akhir-akhir ini. Opini publik tidak selalu rasional, akan tetapi justru memiliki kecenderungan mematahkan tingkat rasionalitas yang ada.

Pada negara Inggris, pemimpin dalam demokrasi liberal membuat keputusan kebijakan luar negeri melalui *House of Commons*. Sebaliknya hal ini dilakukan melalui diskusi intra partai dan pilih Komite dengan sedikit masukan manuver untuk anggota parlemen. Kemampuan dalam memberikan suara atas isu-isu Nasional misalnya perdebatan dalam bidang hak asasi manusia dan etika kepentingan umum dinyatakan lebih positif melalui *Commons*. Kebijakan luar negeri dalam sebuah negara demokratis keputusan dibuat oleh rakyat dan untuk rakyat. Woodrow Wilson (Liberal) berasumsi bahwa opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri, sekalipun pembuat keputusan tersebut mengambil tindakan-tindakan yang berisiko dan dampaknya pemerintah mau tidak mau harus menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Dalam kebanyakan kasus-kasus opini publik dapat membatasi pembuat keputusan atas berbagai tindakan, dan akibatnya memilih kebijakan luar negeri yang disukai oleh publik itu sendiri.

Peran masyarakat dalam membentuk sebuah kebijakan terkait keberlangsungan hidup negaranya dalam sebuah negara demokrasi memang sangatlah dijunjung tinggi. Perbedaan yang tidak terlalu jauh suara untuk tetap pada keanggotaan Uni Eropa dan meninggalkan Uni Eropa hanya berbeda sangat tipis sekali, mengingat pemerintah, parlemen dan rakyat memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Rakyat Inggris mendukung sepenuhnya Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, sedangkan pemerintah melalui kampanye yang disuarakan oleh David Cameron (Perdana Menteri) mendukung Inggris untuk tetap bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah melalui majelis rendah (*House of commons*) sebanyak 60% suara

memilih untuk tetap pada Uni Eropa, sedangkan rakyat berbeda pendapat dengan pemerintah. Maka secara operasional, mengingat kembali Inggris yang merupakan sebuah negara demokratis pemerintah tentu memberatkan pendapat rakyat terkait dengan hal tersebut, sehingga melalui parlemen (pembuat keputusan) maka Inggris tetap pada keputusan untuk tetap keluar dari Uni Eropa pada referendum 2016.

Keputusan rakyat Inggris bukan tanpa alasan, akan tetapi tentu rakyat Inggris memiliki beberapa alasan yang mendukung kuat sehingga diselenggarakannya Referendum Inggris. Alasan tersebut bukan terkait dengan kepentingan Nasional negara Inggris karena tidak menggunakan pemikiran realis dalam menganalisa studi kasus ini akan tetapi melalui pemikiran idealis terkait dengan perasaan (kerugian-kerugian) yang didapatkan rakyat Inggris itu sendiri yang sudah sejak lama ingin keluar dari Uni Eropa.

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang serta analisis singkat yang disampaikan di awal, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

Inggris keluar dari Uni Eropa pada Referendum 2016, dikarenakan pengaruh publik opini yang dibentuk oleh rakyat Inggris menentukan Politik Luar Negeri Inggris. Mengingat Inggris sebuah negara yang demokratis, sehingga memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara lainnya. Keinginan rakyat Inggris untuk mendorong negaranya untuk keluar dari

keanggotaan Uni Eropa karena publik opini yang terbentuk dalam tatanan rakyat Inggris yang memandang bahwa selama keanggotaan dengan Uni Eropa tidak memberikan manfaat yang signifikan terkait dalam sektor pendanaan dan Imigran, sehingga rakyat Inggris tetap berada pada keputusan untuk keluar dari Uni Eropa.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan alasan Inggris keluar dari Uni Eropa pada referendum Inggris 2016
2. Untuk memenuhi syarat akhir di dalam menempuh pendidikan jenjang S-1 di pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel yang saling berhubungan.

G. Jangkauan Penelitian

Membatasi suatu penulisan mempunyai arti yang sangat penting untuk meminimalisir kecenderungan pembahasan yang tidak seimbang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah. Maksud dari adanya ruang lingkup pembatasan sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk mempermudah penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mencari data.

Jangkauan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Jangkauan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas secara umum. Agar penelitian ini tidak meluas dari rumusan masalah, maka peneliti membatasi penelitian ini khusus membahas secara mendetail referendum yang terjadi terakhir pada tanggal 23 Juni 2016.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan ini menggunakan sistem penulisan secara deskriptif dengan membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Pada BAB Pertama berisi mengenai Latar Belakang Masalah, belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mendeskripsikan terkait dengan Kebijakan Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa meliputi deskripsi negara Inggris, Sejarah bergabungnya Inggris ke Uni

Eropa, Kebijakan Inggris bergabung dengan Uni Eropa serta keuntungan-keuntungan yang didapatkan Inggris selama keanggotaannya pada Uni Eropa.

BAB Ketiga mendeskripsikan tentang Kebijakan Inggris keluar dari Uni Eropa meliputi Konstitusi pembuat keputusan dalam negara Inggris, Prosedur keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa, Referendum Inggris pada tahun 1975 dan 2016 serta kebijakan Inggris pasca keluar dari Uni Eropa di bawah pemerintahan baru Theresa May.

BAB Keempat, dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa, penulis akan menjelaskan mengenai analisis Opini publik sebagai penyebab Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa

BAB Kelima, merupakan bab terakhir yang penulis buat untuk menutup topik ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan